

**PERSEPSI PETUGAS SEKTOR TERKAIT TENTANG
KEBAKARAN HUTAN DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA
DI PROPINSI JAMBI**

***Perception of Relevant Sector Officers and The Efforts to Control
on Forest Fires at Jambi Province***

Kenti Friskarini dan Kasnodihardjo¹

Peneliti PTIKM Badan Litbangkes Jl.Percetakan Negara No.29 Jakarta

Email: friskarini@yahoo.com

Diterima: 1 Agustus 2013; Direvisi: 26 Agustus 2013; Disetujui: 2 September 2013

ABSTRACT

Forest fires have a very broad impact, including on public health. Combustion, besides causing fog were also causing air pollution (PM_{10}), increment of greenhouse gases, reduction of lung function and increased incidence of chronic bronchitis were reported. This article was part of the research to determine the impact of forest fires to health that had been conducted in 2011 at Batanghari and Tanjung Jabung district in Jambi Province. Specifically this article discussed about the perception of officials in Jambi related to the problem of forest fires. The study design was retrospective longitudinal and type of research was non- experimental (observational). The study revealed that the relevant officers know and able to explain the magnitude of the problem, the constraints and their attitude towards forest fires. However, even though the efforts had made by the local government, forest fires still happened every year. It showed that forest fires and many factors related such as the habit of burning forests to plantations were still an issue. Results of this study concluded that the officers knowledge were good. They knew about the magnitude of the problem, although there was still limitation on regulation that specifically discussed the handling of the problems. In addition there has no program among all institutions to change the people's behaviour related to forest fires. Regulations that specifically discuss the handling of the problem of forest fires were urgently required, as well as coordination of all related sectors in order to change people's behavioral.

Keywords: *Fire, forest, knowledge, officers*

ABSTRAK

Kebakaran hutan memiliki dampak yang sangat luas, termasuk terhadap kesehatan masyarakat. Sisa pembakaran selain menimbulkan kabut juga mencemari udara (PM_{10}) dan meningkatkan gas rumah kaca dan dilaporkan bahwa efek menahun yang ditimbulkan adalah terjadinya penurunan fungsi paru-paru serta penyakit bronkhitis kronik. Artikel ini mengangkat bagian dari hasil penelitian untuk mengetahui dampak kebakaran hutan terhadap kesehatan yang sudah dilakukan pada tahun 2011 di Provinsi Jambi di Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tentang persepsi petugas terkait di Provinsi Jambi terhadap masalah kebakaran hutan. Desain penelitian adalah *longitudinal restrospektif*, dan jenis penelitian adalah non intervensi (*observational*). Hasil penelitian diketahui bahwa petugas terkait dapat mengetahui dan menjelaskan tentang besaran masalah, kendala maupun sikap mereka terhadap masalah kebakaran hutan. Namun dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemda setempat, kenyataannya kebakaran hutan setiap tahun masih saja terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa kebakaran hutan masih merupakan masalah dan banyak faktor yang mempengaruhi, seperti adanya kebiasaan pembakaran hutan untuk lahan perkebunan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengetahuan petugas yang terkait sudah dapat dikatakan baik, karena mereka mengetahui tentang besaran masalah dan akibat dari kebakaran hutan tersebut, walaupun masih belum adanya perda atau pergub yang membahas secara khusus tentang penanganan masalah kebakaran hutan. Selain itu belum ada kegiatan yang lebih terkoordinasi dari seluruh instansi dalam perubahan perilaku masyarakat yang tidak menguntungkan seperti pembukaan lahan dengan membakar hutan. Diperlukan perda atau pergub yang membahas secara khusus tentang penanganan masalah kebakaran hutan, serta kegiatan yang lebih terkoordinasi dari sektor-sektor terkait dalam perubahan perilaku masyarakat.

Kata kunci: *Kebakaran, hutan, pengetahuan, petugas*

PENDAHULUAN

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lain tidak dapat dipisahkan. Pada saat ini di Indonesia mengalami deforestasi hutan. Deforestasi hutan merupakan penurunan luas hutan baik secara kualitas dan kuantitas sehingga menyebabkan perubahan secara permanen dari areal berhutan menjadi tidak berhutan yang diakibatkan oleh kegiatan manusia.

Berdasarkan data dan hasil analisis Kementerian Kehutanan, pada periode 1985-1997 telah terjadi laju deforestasi di Indonesia seluas 1,8 juta ha/tahun, lalu meningkat pada periode 1997-2000 sebesar 2,8 juta ha/tahun, dan menurun kembali pada periode 2000-2005 sebesar 1,08 juta ha/tahun. Melalui analisa tulang ikan dalam konsultasi publik yang diselenggarakan oleh Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) di tujuh wilayah regional Indonesia, terdapat beberapa faktor penyebab utama deforestasi dan degradasi hutan yaitu perencanaan tata ruang yang tidak efektif dan tenurial yang lemah, manajemen hutan yang tidak efektif, tata kelola dan penegakan hukum yang lemah (Noer, 2013).

Selain faktor-faktor tersebut, ada pula faktor lain yang mempengaruhi terjadinya deforestasi antara lain kebakaran hutan. Menurut UNEP dari WHO tentang *Climate Change*, kebakaran hutan memiliki dampak yang sangat luas, termasuk terhadap kesehatan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan seperti kebakaran hutan yang cukup besar seperti yang terjadi pada tahun 1997 – 1998 menimbulkan dampak di samping kerugian material kayu, non kayu dan hewan. Dampak negatif yang sampai menjadi isu global adalah asap dari hasil pembakaran yang telah melintasi batas negara. Sisa pembakaran selain menimbulkan kabut juga mencemari udara (PM_{10}) dan meningkatkan gas rumah kaca. Gas rumah kaca yang biasa diukur berkaitan dengan kebakaran hutan terdiri dari CO_2 , CO, SO_2 dan NO_2 (Sukana et al, 2011).

Kebakaran hutan menghasilkan asap yang dapat mencemari udara, selanjutnya dengan terpaksa harus kita hisap untuk

bernafas. Asap ini terdiri dari kompleks campuran macam-macam partikel debu dan gas dalam udara. Komposisi campuran asap tergantung dari apa yang dibakar, jadi tergantung dari apa yang ada di dalam hutan tersebut. Misalnya apabila di dalam hutan tersebut dipakai pestisida, maka gas yang terbentuk juga antara lain mengandung partikel pestisida tersebut. Karena itu efeknya terhadap manusia, tergantung juga dari partikel debu dan gas yang ada serta tergantung dari konsentrasinya di udara atau lamanya pencemaran. Lebih jauh tempat kebakaran tentu konsentrasinya lebih rendah dan efeknya pun lebih ringan. Lebih lama tercemar, tentu efeknya lebih berat. Selain itu efeknya terhadap kesehatan tergantung pula pada kesehatan orang yang tercemar asap. Bila orang tersebut kesehatannya baik atau normal, maka efek dari asap akan lebih ringan daripada orang yang sudah mempunyai kronis misalnya pada orang tua (lansia) atau anak balita. Apalagi kalau orang tersebut sudah menderita penyakit paru-paru kronis seperti asma bronkiale, penyakit paru obstruktif menahun (PPOM), dan lain-lain. Efek jangka lama dari pencemaran asap pada manusia belum jelas benar. Namun demikian, dari beberapa penelitian dilaporkan bahwa efek menahun yang ditimbulkan asap adalah terjadinya penurunan fungsi paru-paru serta penyakit bronkhitis kronik (Syafrizal, 2003).

Suatu assessment kondisi kesehatan lingkungan telah dilakukan berkaitan dengan kejadian kebakaran hutan tahun 1997 – 1998 di Sumatera dan Kalimantan. Kondisi kualitas udara juga dianalisis selama kejadian kebakaran hutan tahun 1997 – 1998, dengan parameter kandungan TSP, CO, SO_2 dan NO_x . Di kawasan Sumatera tercatat daerah dengan hasil pengukuran parameter TSP tertinggi di Jambi, yaitu sampai 15 kali di atas standar yang diperkenankan, sedangkan untuk kawasan Kalimantan, daerah dengan hasil pengukuran parameter TSP tertinggi dijumpai di Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu sampai 12,6 kali di atas standar (Martono, 2010)

Berdasarkan analisa data sekunder tahun 2008, bahwa titik api yang terjadi pada tahun tersebut di Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi masih tinggi dan mempengaruhi kualitas udara di sekitarnya. Titik api yang terjadi memicu timbulnya asap

sehingga terjadi peningkatan debu (TSP) dan O₃, walaupun belum melebihi baku standar (Sukana et al, 2011). Sedangkan data penyakit yang diperkirakan berhubungan atau merupakan salah satu dampak dari terjadinya kebakaran hutan seperti ISPA dan pneumonia, berdasarkan hasil dari Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar) tahun 2007 diketahui bahwa prevalensi untuk kasus ISPA dan pneumonia di Provinsi Jambi yaitu sebesar 22,65% dan 1,29%. (Departemen Kesehatan RI, 2007).

Dalam peristiwa kebakaran hutan, terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebabnya. Dalam penjelasan atas PP No.4 tahun 2001 tentang pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan, dalam peristiwa kebakaran hutan dan atau lahan, terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebabnya. Faktor tersebut adalah penyiapan lahan yang tidak terkendali dengan cara membakar, termasuk juga karena kebiasaan masyarakat dalam membuka lahan, kebakaran yang tidak disengaja, kebakaran yang disengaja (arson), dan kebakaran karena sebab alamiah. Kebakaran karena sebab alamiah ini terjadi di daerah yang mengandung batu bara atau bahan lain yang mudah terbakar. Meskipun beberapa faktor tersebut di atas dapat mempunyai pengaruh terhadap terjadinya kebakaran, tetapi faktor yang paling dominan penyebab terjadinya kebakaran adalah karena tindakan manusia. Tindakan manusia di sini tentu saja dipengaruhi oleh pengetahuan dan sikap dari masyarakat maupun para penentu kebijakan terhadap kebakaran hutan tersebut.

Melihat latar belakang tersebut, tulisan ini mengangkat bagian dari hasil penelitian untuk mengetahui dampak kebakaran hutan terhadap kesehatan yang sudah dilakukan pada tahun 2011 dan dilakukan salah satunya di Provinsi Jambi yang pernah mengalami kebakaran hutan yang cukup parah. Artikel ini membahas tentang bagaimana persepsi petugas terkait di Provinsi Jambi terhadap masalah kebakaran hutan yang tentunya akan berpengaruh dalam penanganannya. Manfaat dari artikel ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi, gambaran dan upaya dalam mengurangi dampak kebakaran hutan

terhadap kesehatan masyarakat di daerah tersebut.

BAHAN DAN CARA

Desain penelitian yang digunakan adalah *longitudinal restrospektif*, dan jenis penelitian adalah non intervensi (*observational*). Wilayah Jambi terpilih dalam penelitian ini karena merupakan daerah yang selalu mengalami kebakaran hutan dalam periode sepuluh tahun terakhir. Dari Provinsi Jambi, terpilih Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan pertimbangan merupakan daerah yang mudah terjangkau, mempunyai penduduk yang cukup padat, serta dekat dengan stasiun pengukuran kualitas udara.

Sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya kebakaran hutan adalah faktor manusia, sehingga diperlukan data tentang masalah dan pengendalian kebakaran hutan yang sudah dilakukan oleh petugas kesehatan dan instansi terkait yang berada di wilayah kebakaran hutan dalam kurun waktu 2011 hingga 2012. Untuk mendapatkan data tersebut dilakukan dengan wawancara mendalam. Data-data yang dikumpulkan, dianalisa berdasarkan isi dari hasil wawancara, yang kemudian disajikan secara deskriptif.

Informan dalam penelitian ini sebanyak 16 orang, yang dipilih secara purposif. Petugas yang terpilih dan diharapkan dapat memberi informasi yang tepat berasal dari berbagai instansi yang terkait, sebagai berikut : Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD), Dinas Kehutanan (Dishut), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Perkebunan, Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Kesehatan (Dinkes), Badan Keselamatan Bangsa dan Lintas Masyarakat (Kesbang) dan tokoh masyarakat (toma).

Untuk mendapatkan informasi tentang persepsi petugas sector terkait tentang kebakaran hutan yang ada di daerahnya, maka data yang digali dari informan-informan tersebut adalah pengetahuan mereka tentang besaran dan penyebab terjadinya kebakaran hutan, serta pencegahan dan penanggulangan yang sudah dilakukan, termasuk di dalamnya tentang kebijakan, kerjasama lintas sektor, peran

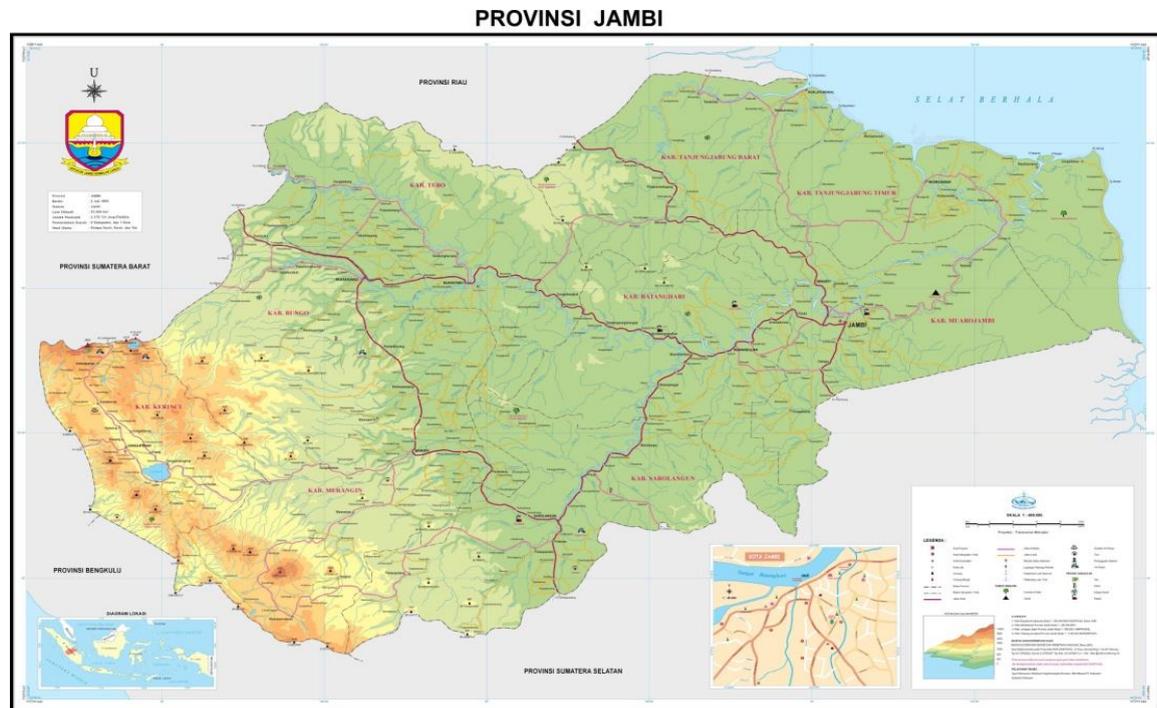
serta masyarakat dan kendala-kendala yang dihadapi.

HASIL

Gambaran Umum Daerah Penelitian

Provinsi Jambi merupakan bagian dari Pulau Sumatera yang terletak di bagian wilayah timur. Topografi Provinsi Jambi

terdiri dari daerah rawa-rawa dan pegunungan. Daerah rawa-rawa sebagian besar terdapat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur, sedangkan daerah pegunungan terletak di Kabupaten Kerinci. Provinsi ini memiliki iklim musim angin timur dengan musim angin kemarau sekitar bulan Juni dan musim penghujan sekitar bulan Oktober. Sebagian besar di daerah Jambi merupakan lahan gambut.



Gambar Peta Provinsi Jambi

Masalah Kebakaran Hutan di Jambi

Terakhir kali kebakaran hutan terbesar di Provinsi Jambi pada tahun terjadi 1997 – 1998. Parameter TSP tertinggi di kawasan Sumatera pada saat itu didapatkan di wilayah ini, yaitu sampai 15 kali diatas standar yang diperkenankan. Kebakaran hutan yang cukup besar dapat berimbas pada terganggunya kesehatan masyarakat karena meningkatnya kandungan PM_{10} , SO_2 , NO_2 , dan CO .

Dari hasil penelitian PSP dari petugas, dapat diketahui antara lain tentang pengetahuan tentang besaran kebakaran yang terjadi di wilayah mereka, selain pandangan mereka tentang penyebab dan pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Menurut Kepala Dinas

Kehutanan Kabupaten Batanghari sewaktu diwawancarai menyampaikan pandangannya tentang besaran kebakaran hutan sebagai berikut :

“...kebakaran hutan merupakan masalah cukup besar dan perlu dikendalikan. Dengan terjadinya kebakaran hutan jika tidak tertangani dengan baik dapat memusnahkan areal hutan dan lahan yang luas. Kebakaran hutan berdampak sangat besar terhadap seluruh segi kehidupan manusia. Baik menyangkut aspek lingkungan maupun aspek kesehatan. Selain itu dengan terjadinya kebakaran hutan keanekaragaman hayati musnah, hilangnya potensi ekonomi, investasi dan lapangan kerja berkurang. Bahkan hubungan (dengan) luar negeri bisa terganggu. Ini semua akibat ulah manusia. Kebakaran hutan dan lahan hampir selalu

terjadi setiap tahun, terutama pada musim kemarau panjang..”

Informasi lain yang didapat bahwa di wilayah Kabupaten Jabung Timur menyebutkan bahwa pada tahun 2011 sudah terjadi tiga kali kebakaran besar. Menurut informan dari Dinas Kesbang (Keselamatan Bangsa dan Lintas Masyarakat), bahwa dampak kebakaran hutan adalah kerugian di bidang ekonomi. Namun menurut informan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Batanghari, menganggap bahwa kebakaran hutan belum merupakan masalah di wilayah Kabupaten Batanghari. Alasan yang dikemukakan di Kabupaten Batanghari masih banyak wilayah hutan. Selain itu kebakaran hutan tidak mengganggu aktifitas masyarakat, jika ada asap karena kebakaran hutan masyarakat menggunakan masker.

Kebakaran berawal di lahan masyarakat kemudian merembet ke hutan dan lahan perkebunan. Informan dari BPLHD (Badan Penanggulangan Lingkungan Hidup Daerah) Kabupaten Jabung Timur. Adapun dampak kesehatan yang ditimbulkannya terjadinya pencemaran lingkungan. Dengan terjadinya kebakaran nampaknya tidak hanya kepekatan udara karena banyaknya asap tetapi juga abu yang beterbangan selama satu bulan lebih, dan hal ini menimbulkan ISPA pada masyarakat.

Petugas survailans Tanjung Jabung Timur menggambarkan besarnya masalah kebakaran hutan di wilayahnya sebagai berikut :

“...kebakaran hutan terakhir terjadi pada bulan Juli sampai Agustus 2011 terletak di wilayah Berbak, Dendang, Rantau Rasau yang merupakan lahan garapan penduduk yang sebagiannya merupakan perkebunan kelapa sawit. Serta hutan lindung gambut dengan luas kurang lebih 200 hektar. Kebakaran hutan dan lahan paling sering terjadi antara bulan Juli sampai September. Lokasi yang sering terbakar adalah lahan-lahan pertanian, perkebunan baru, kawasan hutan yang dekat lahan garapan masyarakat dan kawasan hutan yang telah diokuvasi masyarakat..”

Menurut para petugas yang bekerja pada instansi yang menangani penanggulangan masalah kebakaran hutan

penyebab kebakaran hutan beragam. Salah satunya penyebab kebakaran hanya dengan puntung rokok yang masih menyala dibuang oleh penduduk pada musim kemarau ladang mudah terbakar.

Menurut informasi dari BPLHD Kabupaten Jabung Timur, bahwa :

“... api merupakan kiriman dari kabupaten tetangga (Muara Jambi). Ketika itu terjadi angin kencang. Kemudian masyarakat di daerah itu juga banyak menanam ‘kayu jelutung’ yang dibudidayakan karena sangat cocok ditanam di tanah rawa-rawa tapi jenis ini sangat mudah terbakar. Penyebab kebakaran tidak ada unsur kesengajaan dan bukan karena pola bercocok tanam dan pola bermukim. Pada musim kemarau panjang angin puting beliung juga dapat menyebabkan api yang bisa menyebabkan kebakaran hutan...”

Sedangkan menurut informasi yang disampaikan oleh salah seorang informan dari Dinas Perkebunan bahwa, sebagian besar kebakaran hutan disebabkan oleh pembukaan lahan dari perkebunan, dan faktor dari manusia sebagai penyebab kebakaran adalah 70 persen. Sementara informasi yang disampaikan oleh salah sorang informan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Batanghari, bahwa :

“...kebakaran besar banyak terjadi pada lahan gambut terutama yang dikonversi untuk kawasan budidaya. Kebakaran besar banyak terjadi hampir seluruhnya akibat faktor manusia seperti pembakaran lahan dan hutan untuk area pertanian yang berakibat merambat ke lahan lain dan kawasan hutan. Pembakaran semak yang dilakukan oleh manusia dengan tujuan yang kurang jelas, pembuatan api unggun oleh pencari ikan dan hasil hutan lainnya yang ditinggalkan begitu saja, atau terjadi konflik lahan...”

Pencegahan masalah kebakaran hutan meliputi tindakan pencegahan oleh instansi yang bersangkutan, tindakan yang dilakukan oleh masyarakat termasuk di dalamnya peran tokoh masyarakat, masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi sosial lainnya.

Berbagai upaya pencegahan kebakaran hutan telah dilakukan oleh instansi

terkait. Menurut informan dari Dinas Sosial yaitu dengan program sosialisasi, penegakan peraturan, sosialisasi dan penyuluhan, berikut pernyataannya :

“...kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat di beberapa desa yang rawan terjadi kebakaran hutan. Pengawasan kepada masyarakat terutama pada musim kemarau dan membuat edaran melalui camat untuk diteruskan ke penduduk. Kemudian ada juga tindakan yang dilakukan Polres terhadap pelaku pembakaran hutan bila perlu...”

Salah seorang petugas dari Dinas Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa koordinasi dengan dinas kehutanan secara berkala dilakukan. Hal ini juga dijelaskan oleh informan dari Dinas Perkebunan, bahwa :

“...setiap bulan ada kegiatan rakor di desa, melibatkan beberapa lintas sektor untuk membahas berbagai permasalahan. Salah satu di antaranya adalah mengantisipasi masalah kebakaran hutan. Di samping itu pemda sudah menyiapkan mobil pemadam kebakaran yang berjaga-jaga siap 24 jam. Bupati juga menganjurkan pada setiap acara keagamaan atau ceramah agama agar pesan yang berkaitan dengan kebakaran hutan diselipkan sebagai pesan tambahan materi ceramah...”

Dari segi kebijakan untuk mengatur tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan, menurut informan dari Dinas Perkebunan Provinsi Jambi kebijakan yang diketahui adalah sebagai berikut :

“...perda dan pergub ada yang menyatakan bahwa setiap masyarakat kalau buka lahan (harus) tanpa bakar, hal itu cukup efektif. Kemudian ada rakor yang melibatkan lintas sektor yang tidak secara khusus tentang kebakaran hutan namun berkaitan dengan kepentingan masyarakat yang disebut juga dengan ‘Program Batang Hari Berlian’ yang dikeluarkan berdasarkan SK Bupati...”

Menurut informan dari Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Timur, Peraturan Daerah atau Perda tentang kebakaran hutan memang belum ada, namun sedang dibahas dalam DPRD, sehingga untuk penanggulangan kebakaran hutan di masyarakat dibentuk

kelompok TAGANA (Taruna Siaga Bencana) dan untuk tingkat Provinsi dibentuk Satkorlak (Satuan Koordinasi Pelaksana). Sedangkan untuk peraturan secara nasional, kebanyakan informan menyebutkan tentang UU No 32 tahun 2009, yaitu tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Tentang kebijaksanaan yang selama ini dilakukan, menurut informan yang berasal dari Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, ada dua kebijaksanaan dalam penanggulangan kebakaran hutan, yaitu kebijaksanaan umum dan kebijaksanaan operasional. Kebijakan umum itu meliputi penguatan kelembagaan, peningkatan peran serta seluruh pihak terkait, peningkatan koordinasi antara pusat, Provinsi dan kabupaten, penyediaan dana yang memadai, penerapan *zero burning* terutama pada perusahaan pengguna lahan, sosialisasi peraturan perundangan bidang kebakaran lahan dan hutan, penegakan hukum, dan penanganan dampak dan pasca kebakaran hutan dan lahan. Sedangkan kebijakan operasional untuk pencegahan kebakaran hutan, meliputi peningkatan peran serta masyarakat untuk pencegahan kebakaran hutan melalui kegiatan penyuluhan, kampanye, edaran, himbauan dan lain-lain, mengelola biomasa yang potensial terbakar (seperti sisa *land clearing* dan pembalakan kayu), misalnya dimanfaatkan untuk keperluan lain seperti kayu pertukangan kecil, bahan pulp, kayu bakar, arang pupuk, dan lainnya), membangun prasarana pengendali seperti sekat bakar, embung air, dan lainnya, serta menghindari pengeringan yang berlebihan terutama pada lahan-lahan basah.

Kerjasama lintas sektor dalam penanganan masalah kebakaran hutan, menurut informan dari Dinas Sosial Kabupaten Jabung Timur bahwa di tingkat pemda sudah dilakukan pertemuan rutin per tiga bulan untuk menentukan langkah-langkah pengamanan, selain adanya evaluasi oleh ketua Satlak (Satuan Pelaksana) yang dipimpin oleh wakil bupati. Sedangkan pernyataan informan dari BPLHD tentang kerjasama lintas sektor di daerahnya adalah sebagai berikut :

“...kerjasama lintas sektor cukup baik, karena tupoksi masing-masing dinas

sudah jelas. Pada tahun 2011 sudah terbentuk dinas khusus yang paling bertanggung jawab untuk menangani kebakaran hutan yang disebut Badan Bencana Alam sesuai dengan perda, strukturnya sudah ada tinggal menunggu penempatan staf atau pejabat yang dalam waktu dekat akan dilantik..”

Menurut informan tokoh masyarakat, pelaksanaan kerjasama lintas sektor seperti Dinas Kehutanan, Pemda, Dinas Kesehatan, polisi, dan tokoh-tokoh masyarakat yang dihimbau untuk hadir dalam rapat-rapat koordinasi di tingkat kabupaten. Rapat koordinasi tersebut bukan hanya untuk masalah kebakaran tapi juga untuk kasus wabah atau KLB penyakit.

Selain adanya kebijakan-kebijakan tersebut, peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan juga dianggap penting oleh para informan. Bukan hanya masyarakat secara umum namun juga meliputi LSM dan organisasi sosial lainnya. Pentingnya peranan masyarakat diungkapkan oleh informan dari Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Timur sebagai berikut :

“...masyarakat ikut turun bersama-sama mengatasi kebakaran hutan dan disuport oleh logistik oleh pemda. Kemudian Tagana (taruna siaga bencana) yang dihimpun untuk melaksanakan pencegahan kebakaran hutan. Masyarakat bergotong royong dibantu oleh aparat pemerintah daerah dan dari pusat untuk melokalisir supaya api tidak meluas. Peran serta masyarakat cukup besar dalam mengatasi masalah kebakaran hutan dengan gotong royong memadamkan api. Melakukan penghijauan seperti penanaman pohon, pembibitan pohon Jelutung yang daunnya lebar-lebar, hingga umat muslim yang melakukan sholat bersama untuk minta hujan...”

Besarnya peran serta masyarakat dalam penanggulangan kebakaran hutan ini juga disebutkan oleh informan dari Dinas Perkebunan Provinsi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Di Tanjung Jabung Timur malahan sudah mempunyai kelompok penanggulangan masalah kebakaran hutan, yaitu MPA (Masyarakat Peduli Api) dan melakukan rotasi jaga dengan kegiatan ronda

selama kejadian kebakaran di wilayah mereka. Menurut tokoh masyarakat juga disebutkan bahwa jika ada kejadian kebakaran hutan mereka selalu siap siaga. Hal ini disebabkan adanya kerjasama yang baik dari pihak pemda dan ada LMD (Lembaga Masyarakat Desa) yang cukup aktif dalam menangani masalah dalam masyarakat.

Antisipasi yang dilakukan oleh masyarakat tersebut, didorong oleh akibat kebakaran hutan terhadap kesehatan yang dirasakan oleh masyarakat, seperti yang dituturkan oleh petugas surveilans Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai berikut :

“...kebakaran hutan menimbulkan asap pekat yang mengganggu pernafasan, juga ISPA dan diare karena masyarakat mengkonsumsi air sungai dan menimbulkan kecelakaan di laut karena jarak pandang yang terganggu kabut asap...”

Untuk penanggulangan apabila terjadi kabut asap akibat kebakaran hutan yang dapat menimbulkan ISPA, maka kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan setempat adalah dengan pemberian masker kepada masyarakat dan adanya himbauan untuk tidak keluar rumah pada saat kejadian.

Ketika ditanyakan kepada para informan tentang kendala yang dialami dalam penanggulangan masalah kebakaran hutan, ternyata didapatkan jawaban yang beragam. Beberapa menyatakan tidak ada kendala, namun informan yang berasal dari instansi Dinas Sosial menyatakan sebagai berikut :

“...kendala yang dialami antara lain adalah transportasi yang sulit untuk dijangkau untuk memobilisasi peralatan (untuk memadamkan api), dan masalah ketersediaan sumber air...”

Sementara informan yang berasal dari BPLHD menuturkan bahwa masalah penganggaran, sarana prasarana dan SDM yang terbatas merupakan kendala dalam penanggulangan masalah kebakaran hutan. Selain itu kendala yang juga disebutkan oleh beberapa informan yang lain adalah lokasi kebakaran yang tersebar dan sulit terjangkau.

Kendala dalam penanganan masalah kebakaran hutan secara lebih luas juga disampaikan oleh salah satu informan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Batanghari, sebagai berikut :

“...budaya pengolahan lahan dengan pembakaran masih sulit diubah. Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup, terbatasnya sumber daya manusia, pemanfaatan limbah kayu yang belum optimal. Selain itu koordinasi antara unit-unit terkait yang belum maksimal, peralatan yang dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang masih terbatas. Juga terbatasnya dana operasional untuk pecegahan dan pengendalian, baik di instansi pemerintahan maupun perusahaan. Juga termasuk di dalamnya adalah meningkatnya konvensi lahan basah gambut menjadi areal budidaya. Kebakaran di lahan gambut masih sulit diatasi..”

PEMBAHASAN

Persepsi merupakan hal yang penting karena dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Menurut Bandura A, perilaku seseorang sangat dipengaruhi oleh keyakinannya akan keberhasilan upaya yang dilakukan, misalnya keyakinan akan kemampuannya untuk melaksanakan perilaku yang dimaksud dengan baik dan pengalaman-pengalaman menyenangkan sebagai hasil dari perilaku tersebut. Robbin mendefinisikan persepsi sebagai proses di mana seseorang mengorganisasikan dan menginterpretasikan sensasi yang dirasakan dengan tujuan untuk memberi makna terhadap lingkungannya. Persepsi itu sendiri dipengaruhi oleh antara lain adalah pengalaman atau pengetahuan, harapan, kebutuhan, motivasi dan budaya. Pengetahuan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi, merupakan hasil penginderaan manusia atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indera yang dimilikinya. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh dari mata dan telinga. Pengetahuan dari para informan ini menunjukkan tentang apa yang diketahui sehingga dapat menjadi salah satu dasar jika

dilakukan usaha untuk perubahan perilaku nantinya (Notoatmodjo, 2005)

Dari hasil wawancara mendalam tentang pengetahuan informan tentang besaran masalah kebakaran hutan di daerah mereka di atas dapat diketahui bahwa kebakaran hutan masih merupakan masalah demikian juga dengan dampak yang ditimbulkannya. Hasil tersebut menunjukkan kepekaan dari para petugas terkait tentang masalah kebakaran hutan terhadap masyarakat di daerahnya. Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bambang Sukana dan kawan-kawan, yang dianalisa oleh Perwitasari, yaitu pada tahun 2008 di Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi diketahui bahwa titik api yang terjadi masih tinggi dan mempengaruhi kualitas udara di sekitarnya sehingga kebakaran hutan masih merupakan masalah yang cukup besar sehingga menimbulkan dampak kesehatan masyarakat di sekitarnya (Perwitasari, 2012)

Dalam penanganan kebakaran hutan, peraturan atau regulasi yang menjadi acuan oleh para informan yang merupakan perwakilan dari institusi yang terkait dengan masalah tersebut, adalah UU No 32 tahun 2009, yaitu tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang isinya antara lain pada pasal 69 ayat 1 adalah melarang setiap orang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup, serta melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.

Peraturan tersebut diterjemahkan dalam dua kebijaksanaan dalam penanggulangan kebakaran hutan, yaitu kebijaksanaan umum dan kebijaksanaan operasional. Kebijakan-kebijakan yang ada di Provinsi Jambi tersebut jika dibandingkan dengan yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah pada saat penelitian dilakukan secara bersamaan, dapat dilihat adanya perbedaan. Di Provinsi Kalimantan Tengah, terdapat Perda dan Keputusan dari Gubernur yang khusus dan berhubungan dengan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan, seperti Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No 5 tahun 2003 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan atau Lahan (Sukana et al, 2011).

Walaupun pada saat pelaksanaan penelitian diketahui belum ada perda atau pergub yang membahas secara khusus tentang penanganan masalah kebakaran hutan, namun kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan sudah menggambarkan komitmen yang kuat dari penentu kebijakan dalam masalah tersebut. Komitmen ini juga diwujudkan dengan dibentuk kelompok TAGANA (Taruna Siaga Bencana) dan untuk tingkat Provinsi dibentuk Satkorlak (Satuan Koordinasi Pelaksana) untuk penanggulangan kebakaran hutan, seperti yang disampaikan oleh salah satu informan.

Selain itu kebijakan lainnya adalah yang berhubungan adalah adanya Program Batang Hari Berlian. Program ini merupakan visi dari pemerintah daerah Batang Hari dengan kepanjangan “Bangun Ekonomi Rakyat, Lanjutkan Pembangunan dengan Iman dan Pemerataan tahun 2016” yang salah satunya berkaitan dengan kebijakan yang disebutkan oleh informan dari Dinas Perkebunan Provinsi tersebut, yaitu meningkatkan penggalian potensi sumber daya alam sebagai salah satu sumber daya pembangunan, dengan prinsip berkelanjutan, serta menjaga kelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem.

Melihat hasil penelitian di atas diketahui bahwa persepsi para petugas yang terkait dengan terjadinya kebakaran hutan sudah dapat dikatakan baik, melihat pengetahuan mereka tentang besaran masalah, kendala maupun sikap mereka terhadap masalah. Namun dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemda setempat dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan, dalam kenyataannya kebakaran hutan setiap tahun masih saja terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa kebakaran hutan masih merupakan masalah dan banyak faktor yang mempengaruhi, seperti yang disampaikan oleh beberapa informan tentang adanya kebiasaan pembakaran hutan untuk lahan perkebunan, baik dari masyarakat maupun pengusaha.

Merubah perilaku masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran hutan secara cepat memang sulit karena perlu adanya kegiatan perubahan perilaku yang terkoordinasi, begitu juga penanganan kendala-kendala yang menyertai seperti

anggaran, sarana prasarana, selain perda atau pergub yang membahas secara khusus tentang penanganan masalah kebakaran hutan sehingga masyarakat maupun para pemakai hutan seperti pengusaha yang memiliki HPH mau melakukan pembukaan lahan dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan secara deskriptif bahwa pengetahuan petugas yang terkait sudah dapat dikatakan baik, karena mereka mengetahui tentang besaran masalah dan akibat dari kebakaran hutan tersebut, walaupun masih belum adanya perda atau pergub yang membahas secara khusus tentang penanganan masalah kebakaran hutan. Selain itu belum ada kegiatan yang lebih terkoordinasi dari seluruh instansi dalam perubahan perilaku masyarakat yang tidak menguntungkan seperti pembukaan lahan dengan membakar hutan.

Saran

Diperlukan perda atau pergub yang membahas secara khusus tentang penanganan masalah kebakaran hutan, serta kegiatan yang lebih terkoordinasi dari sektor-sektor terkait dalam perubahan perilaku masyarakat.

UCAPAN TERIMAKASIH

Dalam tulisan ini kami sampaikan terimakasih kepada Kepala Pusat Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang telah memberikan dukungan kepada kami sehingga penelitian ini dapat terlaksana. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh instansi yang terkait di Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Jabung Timur, Provinsi Jambi

DAFTAR PUSTAKA

- Bandura, A. , Social Learning Theory, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. 1977.
Departemen Kesehatan RI. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Desember 2008.

- Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS), Laporan Nasional 2007.
- Martono H, Kondisi Kesehatan Lingkungan Dampak Kebakaran Hutan, Prosiding, Seminar Nasional ke 45 Temu Ilmiah Jaringan Kerjasama Kimia Indonesia, 2010
- Noer, Faktor Penyebab Utama Deforestasi dan Degradasi Hutan; Tersedia dari <http://noerdblog.wordpress.com>. (Accesed 20 Februari 2013)
- Notoatmodjo S, Promosi Kesehatan Teori dan Aplikasi, (Penyunting), PT Rineka cipta Jakarta, 2005
- Perwitasari D, Gambaran Kebakaran Hutan dengan Kejadian Penyakit ISPA dan Pneumonia di Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi tahun 2008, Jurnal Ekologi Kesehatan Vol.11 Nomor 2, Juni 2012
- Sukana B, et al, Dampak Kebakaran hutan terhadap Kesehatan Masyarakat, Laporan Akhir Penelitian, Pustek IKM Balitbangkes Kemenkes RI, Jakarta, 2011
- Syafrizal, Dampak Kebakaran Hutan terhadap Kesehatan Manusia, RIMBA Kalimantan Vol.8 No.2, Fakultas Kehutanan Unmul, 2003